

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Papua Nugini merupakan sebuah kawasan yang termasuk dalam wilayah Oceania. Secara geografis, kawasan ini terletak di sebelah timur pulau Papua, yang merupakan bagian dari negara Indonesia. Selain itu, Papua Nugini juga berseberangan dengan benua Australia.¹ Maka, penulis memilih topik ini karena Papua Nugini memiliki kedekatan geografis dengan Indonesia. Meskipun demikian, dalam konteks keagamaan, khususnya Islam, umat Muslim di Papua Nugini tergolong sebagai kelompok minoritas. Berdasarkan data sensus tahun 2000, jumlah penduduk Papua Nugini mencapai 5.140.476 jiwa. Berdasarkan sensus tersebut, tercatat terdapat antara 1.000 hingga 2.000 umat Muslim di Papua Nugini, yang berkontribusi sekitar 0,04% dari total populasi.² berdasarkan *World Religions Database* yang diterbitkan oleh *Boston University* pada tahun 2020, populasi Muslim di Papua Nugini diperkirakan mencapai sekitar 10.000 jiwa dari total sembilan juta jiwa penduduk di Papua Nugini.³

Keberagaman agama di Papua Nugini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya aspek historis. Papua Nugini pernah

¹ Bryant J Allen, 'The Geography Of Papua New Guinea', *Human Biology in Papua New Guinea*, November 1992, hlm. 37, diakses tanggal 27 Oktober 2024 pada laman researchgate.net/258022948/.

² Houssain Kettani, 'Muslim Population in Oceania: 1950 – 2020', *International Journal of Environmental Science and Development*, May 2014, hlm.3, diakses tanggal 27 Oktober 2024 pada laman researchgate.net/271301613/.

³ United States Department of State, *International Religious Freedom Report*, 2022, hlm.2 dikutip tanggal 13 Mei 2025 pada laman state.gov/reports/

di bawah kekuasaan Inggris dan Australia, yang menjadikan Papua Nugini mempunyai keberagaman agama dan budaya yang signifikan. Beberapa diantaranya ialah tahun 1880 hingga 1906, misionaris Jerman tiba di Papua Nugini dengan tujuan menyebarkan agama Kristen. Papua Nugini juga memiliki tradisi spiritual asli yang kaya, terdiri dari kisah-kisah mitos dan karakter-karakter agama tradisional.⁴ Latar belakang historis Papua Nugini juga menjadi salah satu faktor penting yang mendorong penulis untuk memilih topik ini. Beberapa negara yang pernah menguasai wilayah Papua Nugini, seperti Inggris, Australia, hingga Jerman, telah memperkenalkan berbagai budaya dan agama yang beragam untuk Papua Nugini. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri terhadap proses Islamisasi di Papua Nugini.

Islam diyakini masuk pertama kali di Papua Nugini pada awal tahun 1500-an, berdasarkan bukti kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh kapal-kapal dagang Arab pada era ini. Pengaruh Islam terus berlanjut selama periode kesultanan, yang berakhir pada tahun 1800-an. Catatan tambahan juga menggambarkan interaksi antara kapal-kapal dagang Makassar dan para pekerja Muslim yang bekerja di sepanjang wilayah pesisir utara dan selatan Papua Nugini hingga awal tahun 1900-an.⁵ Namun, bukti-bukti

⁴ Friedegard Tomasetti, 'Traditional Religion: Some Perceptions by Lutheran Missionaries in German New Guinea', *Journal of Religious History*, 22.2 (1998), hlm. 195, diakses tanggal 28 Oktober 2024 pada laman onlinelibrary.wiley.com.

⁵ Pamela Swadling, Roy Wagner, dan Billai Laba, *Plumes from Paradise: Trade Cycles in Outer Southeast Asia and Their Impact on New Guinea and Nearby Islands until 1920*, (Sydney University Press, 2019) hlm. 30,

tersebut menunjukkan indikasi tersirat mengenai masuknya Islam ke Papua Nugini, sementara itu, keberadaan Islam dalam konteks kegiatan keagamaan tidak tampak secara signifikan.

Interaksi formal antara Papua Nugini, dengan Muslim dimulai pada tahun 1975 setelah Papua Nugini mencapai kemerdekaan. Kontak awal ini difasilitasi oleh kedatangan para pekerja imigran kontrak dari Asia dan Afrika. Seiring berjalannya waktu, pekerja Muslim yang terampil dari negara-negara seperti India, Pakistan, Bangladesh, dan lainnya mulai bermigrasi ke Papua Nugini. Orang-orang ini mendapatkan pekerjaan di berbagai sektor di Papua Nugini, termasuk lembaga pendidikan tinggi, departemen pekerjaan umum, dan bidang administratif lainnya. Selain itu, kemerdekaan Papua Nugini juga membuka jalan bagi peningkatan kerja sama dengan negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia dan Malaysia.⁶

Perkembangan awal Muslim di Papua Nugini menunjukkan kemajuan penting pada tahun 1978. Berdirinya sebuah organisasi Muslim (belum diresmikan pemerintah), yang kemudian dikenal sebagai ISPNG (*Islamic Society of Papua New Guinea*). Kelompok ini didirikan di kota Lae oleh Muslim yang merupakan staf pengajar di Lae Unitech, sebuah institusi pendidikan tinggi yang terletak di kota tersebut. Pendirinya adalah Dr. Qazi Ashfaq

diakses tanggal 07 November 2024 pada laman jstor.org/stable/j.ctv10vkzrf.

⁶ Graeme Hugo, 'Migration in the Asia-Pacific region', *Occasional Papers*, 2005, hlm.15, diakses tanggal 08 November 2024 pada laman <https://internationalorganizationformigration/com/>.

Ahmad, dan seorang profesor teknik mesin keturunan India dan Dr. Abdullah Gurnah, yang berasal dari Zanzibar.

Pada periode yang hampir bersamaan, sekitar tahun 1977 hingga 1978, sejumlah Muslim imigran di Port Moresby yang bekerja di berbagai instansi pemerintah Papua Nugini, lembaga negara, dan Universitas Papua Nugini (UPNG), yakni Mohammad Afzal Choudry (dari Pakistan), Aitiqaad Hussain (dari Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB), Tawwakul Hussain (dari Pakistan), Noorul Amin (dari Bangladesh), Ilteja Hussain dan Shaukat Noor Khan (dari India), Ahmad Badwi (dari Sudan), serta Umar (dari Mesir) memutuskan untuk mengadakan pertemuan rutin setidaknya sekali seminggu.

Mereka secara konsisten melaksanakan salat magrib berjamaah setiap hari Jumat. Shalat tersebut biasanya dilakukan di kampus UPNG, atau di kediaman salah satu anggota kelompok. Selanjutnya, mereka terintegrasi dalam organisasi *Islamic Society of Papua New Guinea* hingga akhirnya memperoleh pengakuan resmi dari Pemerintah Papua Nugini pada tahun 1983.⁷

Rentang waktu antara tahun 1978 hingga 1983 menandai dibentuknya dan disahkannya organisasi Muslim di Papua Nugini. Periode ini menandakan dimulainya upaya organisasi Muslim untuk menyelesaikan beberapa problematika yang dihadapi oleh Muslim minoritas di Papua Nugini dan membangun kehadiran

⁷ Mohammad Choudry Afzal, 'My Memories of Islam in Papua New Guinea', *Islamic Society of Papua New Guinea Official Website*, 2008, diakses tanggal 09 November 2024 pada laman <https://ispng.com/articles/>.

yang diakui negara. Beberapa upaya *Islamic Society of Papua New Guinea* (ISPNG) dapat dilihat dalam berbagai bentuk, salah satunya dalam ranah sosial, yaitu upaya untuk mengubah praktik dan kebiasaan pribadi menjadi bagian dari ranah publik, yang mulai menegaskan eksistensi Islam di Papua Nugini.

Selain itu, perjuangan dalam ranah politik juga dilakukan melalui serangkaian upaya diplomatik, seperti pengiriman surat resmi menggunakan kop surat ISPNG kepada departemen dakwah di Arab Saudi, guna memohon dukungan bagi umat Muslim di Papua Nugini serta untuk mendukung penyebaran dakwah Islam. Upaya komunikasi ini berkontribusi pada keikutsertaan Papua Nugini sebagai anggota pendiri *Regional Islamic Da'wah Council of South East Asia and Pacific (RISEAP)*, yang resmi dibentuk pada 11 November 1980.⁸

Sebagai sebuah kelompok minoritas, Muslim di Papua Nugini tentunya menghadapi sejumlah problematika internal. Salah satunya ialah keterbatasan fasilitas untuk melaksanakan ibadah, seperti shalat yang hanya dapat dilakukan di rumah masing-masing, mengingat belum adanya masjid atau mushola yang memadai pada tahun 1980 awal *Islamic Society of Papua New Guinea* dibentuk. Selain itu, masalah terkait dengan makanan halal juga menjadi hambatan, karena belum tersedia tempat makan yang dapat menjamin kehalalan konsumsi bagi umat Muslim di Papua

⁸ Scott Flower, 'The Struggle to Establish Islam in Papua New Guinea (1976-83)', *Journal of Pacific History*, 44.3 (2009), hlm. 246-247 diakses tanggal 10 November 2024 pada laman [jstor.org/stable/25701184](https://www.jstor.org/stable/25701184).

Nugini. Perayaan hari raya Idul Adha juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat kesulitan dalam memperoleh bahan baku hewan kurban, seperti sapi dan kambing, yang terbatas karena tingginya permintaan. Keterbatasan akses terhadap pendidikan Islam, terutama bagi mualaf yang merupakan warga negara asli Papua Nugini serta anak-anak, turut menjadi persoalan yang dihadapi oleh organisasi Muslim di negara tersebut.

Selain itu, problematika eksternal juga dihadapi oleh *Islamic Society of Papua New Guinea*, diantaranya persaingan dalam penyebaran agama, khususnya dengan agama kristen, yang semakin intensif. Ancaman berupa kekerasan verbal maupun fisik yang dilakukan oleh sebagian warga lokal maupun institusi keagamaan Kristen setempat mencerminkan bentuk penolakan terhadap keberadaan Muslim di Papua Nugini. Kondisi ini menjadi tantangan signifikan bagi *Islamic Society of Papua New Guinea* dalam upaya memperbaiki stigma negatif dan membangun citra positif umat Islam, guna meminimalisir potensi diskriminasi terhadap Muslim minoritas di Papua Nugini.

Menghadapi beberapa problematika ini, organisasi Muslim di Papua Nugini memandang penting untuk membentuk *Islamic Society of Papua New Guinea (ISPNG)* sebagai sebuah asosiasi yang terdaftar secara resmi. Oleh karena itu, mereka berharap dapat mengakses dana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan-kegiatan mereka, serta memastikan pengelolaan dana tersebut dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, dengan pengelolaan yang formal dan terorganisir, organisasi

Muslim juga dapat memenuhi fasilitas beribadah dan kebutuhan khusus umat Muslim di Papua Nugini.⁹

Topik terkait dengan Islam di Papua Nugini mulai mendapatkan perhatian luas pada tahun 2001, berkaitan dengan peristiwa serangan 11 September 2001 di *Washington, D.C* yang mempengaruhi wacana global mengenai isu keamanan. Namun, meskipun ada perhatian terhadap isu tersebut, tidak ditemukan bukti yang secara langsung mengaitkan organisasi Muslim di Papua Nugini dengan ancaman terhadap keamanan. Selain itu, jumlah umat Muslim di Papua Nugini yang relatif kecil, menjadikan mereka tidak dianggap sebagai kelompok yang berpotensi mengancam stabilitas atau keamanan masyarakat setempat. Namun disisi lain, populasi umat muslim di Papua Nugini meningkat secara signifikan pada tahun 2001, karena mulai dikenal oleh masyarakat secara luas.¹⁰

Minimnya kajian sejarah Islam terkait topik ini menandakan pentingnya, bagi penulis, untuk melanjutkan penelitian ini dalam bentuk skripsi. Hal ini tercermin dari karya Philip Gibbs mengenai *“Other Religious Groups and Religious Movements in Papua New Guinea”* yakni kajian tentang agama dan gerakan keagamaan di

⁹ David Kavanamur, dkk, *Building a Nation in Papua New Guinea: Views of The Post-Independence Generation* (Canberra: Pandanus Books, 2003) hlm. 235, diakses tanggal 10 November 2024 pada laman openresearch-repository.anu.edu.au/.

¹⁰ R.G Crocombe, *The New South Pacific* (Australian National University Press, 1973) hlm. 67, diunduh tanggal 10 November 2024 pada laman openresearch-repository.anu.edu.au/.

Papua Nugini, tidak tercantum nama Islam sama sekali.¹¹ Oleh karena itu, penelitian ini memiliki relevansi yang signifikan bagi penulis, karena bertujuan untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh *Islamic Society of Papua New Guinea* (ISPNG) dalam mengatasi problematika sosial yang dihadapi oleh Muslim minoritas di Papua Nugini. Penelitian ini mencakup periode sejak berdirinya organisasi tersebut pada tahun 1978 hingga tercapainya perkembangan pesat jumlah umat Muslim di Papua Nugini pada tahun 2001.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah yang diidentifikasi adalah:

1. Bagaimana sejarah berdirinya *Islamic Society of Papua New Guinea* dan masuknya islam ke Papua Nugini?
2. Bagaimana problematika umat Muslim minoritas di Papua Nugini?
3. Bagaimana upaya *Islamic Society of Papua New Guinea* dalam menyelesaikan problematika umat Muslim minoritas di Papua Nugini?

C. Tujuan Penelitian

Melihat rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menggambarkan sejarah berdirinya *Islamic Society of Papua New Guinea* dan masuknya islam ke Papua Nugini.

¹¹ Philip Gibbs, 'The Religious Factor in Contemporary Papua New Guinea Politics', 2009, hlm.28 diakses tanggal 10 November pada laman philipgibbs.org/ .

2. Untuk menggambarkan problematika umat Muslim minoritas di Papua Nugini.
3. Untuk menggambarkan upaya *Islamic Society of Papua New Guinea* dalam menyelesaikan problematika umat Muslim minoritas di Papua Nugini.

D. Batasan Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada batasan temporal yang dimulai pada tahun 1978, yaitu saat pembentukan *Islamic Society of Papua New Guinea*, dan berakhir pada tahun 2001, ketika jumlah populasi Muslim di Papua Nugini mengalami peningkatan signifikan dan peradaban Islam di Papua Nugini mulai terbentuk secara aspek keagamaan, relasi sosial, pendidikan, ekonomi, identitas dan program.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai Islam di Papua Nugini masih tergolong terbatas, khususnya dalam konteks studi sejarah Islam. Hasil penelusuran literatur menunjukkan minimnya penelitian terdahulu yang ditulis menggunakan bahasa Indonesia. Namun, untuk mengidentifikasi *research gap* atau perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, tinjauan terhadap literatur yang ada sangat diperlukan. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penulis ialah:

Marc Tabani, *Island Islam in Melanesia: an Overview* jurnal ini membahas proses Islamisasi di kawasan Pasifik Selatan, khususnya di negara-negara Melanesia seperti Papua Nugini, Pulau Solomon, dan Vanuatu, yang muncul sebagai tantangan

terhadap dominasi agama kristen yang telah eksis. Proses Islamisasi di wilayah Melanesia ini mencakup perdebatan mengenai identitas budaya, politik, dan agama, serta bagaimana Islam dapat disesuaikan dengan tradisi lokal dan perubahan sosial yang tengah berlangsung. Perbedaan antara jurnal ini dan penelitian penulis terletak pada cakupan wilayah pembahasan, di mana jurnal ini mencakup kawasan yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada Papua Nugini, tetapi juga mencakup beberapa negara lainnya di Melanesia. Selain itu, jurnal ini menggunakan metode pengumpulan data observasi dengan teori identitas budaya.

Scott Flower, *Islam and Christian-Muslim Relations* jurnal ini berisi tentang kontroversi antara kristenisasi dan Islamisasi, di mana meningkatnya lebih dari 500% jumlah Muslim sejak tahun 2001, menimbulkan ketegangan antara umat kristen dan Muslim di Papua Nugini. Mereka memilih Islam karena umat pribumi merasa terdorong untuk menolak atau melawan pengaruh kekristenan, yang mereka lihat sebagai bagian dari warisan kolonial yang menghancurkan agama dan budaya asli mereka. Perbedaan antara jurnal tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan. Jurnal tersebut mengkaji perlawanan dan penolakan terhadap agama Kristen, dengan menggunakan metode data lapangan yang diperoleh sejak tahun 2007 di kalangan komunitas Muslim yang berkembang di Papua Nugini, guna mengevaluasi dinamika hubungan antara umat Kristen dan Muslim. Jurnal ini menggunakan teori resistensi kultural.

Ibraheem Mikail Abiola, dkk, *Historical Investigation to the Problems and Challenges of Muslims in Papua New Guinea* jurnal ini menyoroti tentang tantangan yang dihadapi oleh umat Muslim yang hidup sebagai minoritas di negara-negara non-Muslim, seperti Papua Nugini, di mana mereka sering dipandang sebagai ancaman atau masalah oleh masyarakat mayoritas. Hal tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama membahas problematika yang dihadapi oleh umat Muslim di Papua Nugini sebagai kelompok minoritas. Namun, terdapat perbedaan signifikan antara jurnal tersebut dan penelitian ini, yaitu dalam hal hasil pembahasan. Jurnal tersebut mengkaji sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh komunitas Muslim minoritas di Papua Nugini, namun tidak membahas secara mendalam upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Metode penelitian jurnal ini ialah metode penelitian sejarah.

Holger Wamk, *The Coming of Islam and Moluccan-Malay Culture to New Guinea 1500–1920* jurnal ini membahas proses masuknya Islam ke wilayah Papua Nugini, terutama di sepanjang pesisir utara, yang dipengaruhi oleh peran kesultanan Tidore. Terdapat perbedaan yang jelas antara jurnal tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan, terutama dalam hal batas temporal awal. Jurnal tersebut menyoroti proses masuknya Islam ke Papua Nugini sebelum kedatangan imigran dari wilayah-wilayah beragama Islam, yaitu melalui jalur perdagangan dan interaksi antara pedagang Muslim dengan masyarakat pesisir di wilayah tersebut. Metode yang digunakan dalam jurnal ini ialah

metode penelitian sejarah dengan teori perdagangan dan kekuasaan.

Philip Gibbs, *Political Discourse and Religious Narratives of Church and State in Papua New Guinea* jurnal ini mengkaji mengenai hubungan antara agama dan politik di Papua Nugini, dengan fokus pada penggunaan simbol-simbol agama yang bertujuan untuk memengaruhi politik dan kebijakan negara. Perbedaan utama antara jurnal ini dan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada perspektif yang digunakan. Jurnal ini ditulis dari sudut pandang agama Kristen, sementara penelitian ini mengangkat sudut pandang agama Islam. Meskipun demikian, keduanya memiliki kesamaan, yakni membahas problematika dalam upaya mempertahankan agama, baik dalam aspek sosial maupun politik. Teori yang digunakan pada jurnal ini ialah teori simbolisme agama dengan metode pendekatan Antropologi.

F. Landasan Teori

Teori adalah kerangka kerja konseptual yang menghubungkan ide-ide abstrak untuk memberikan pemahaman tentang fenomena tertentu. Model konseptual ini membantu penulis dalam mengorganisir dan menggambarkan peristiwa secara sistematis terkait fenomena yang diteliti. Selain itu, teori merupakan proses pengembangan konsep-konsep, untuk menjelaskan terjadinya suatu peristiwa. Agar sebuah teori valid secara empiris, teori tersebut harus dapat diuji dan diverifikasi secara ilmiah. Landasan teori pada dasarnya memandu penulis dalam menentukan fokus penelitian dan mengembangkan instrumen pengukuran yang tepat

untuk pembahasan selanjutnya. Seperti yang didefinisikan oleh Little John dan Karen Foss, teori adalah sistem abstrak dari konsep-konsep yang saling terkait untuk memfasilitasi pemahaman kita tentang suatu fenomena.¹²

Berdasarkan topik penelitian penulis yang berjudul *“Islamic Society dan Problematika Muslim Minoritas di Papua Nugini Pada Tahun 1978-2001”* penelitian ini mengacu pada sejumlah teori yang menjadi dasar analisis dalam membahas permasalahan tersebut, di antaranya:

1. Teori Islamisasi

Teori Islamisasi merujuk pada proses adopsi elemen-elemen agama dan budaya Islam oleh suatu wilayah atau masyarakat, yang mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti hukum, politik, pendidikan, dan sosial. Proses Islamisasi sering kali terkait dengan gerakan atau kebijakan yang mendorong penerapan nilai-nilai Islam, baik dalam konteks kehidupan pribadi, maupun dalam ranah kehidupan sosial-politik. Menurut Muhammad Naquib al-Attas, Islamisasi bukan hanya usaha untuk mengintegrasikan atau menyandingkan ilmu pengetahuan umum dengan ilmu keIslaman. Sebaliknya, Islamisasi merupakan suatu upaya untuk mengubah dasar-dasar dan cara berpikir ilmu pengetahuan umum yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam, agar selaras dengan prinsip-prinsip dan ajaran Islam.¹³

¹² Stephen W. Littlejohn and Karen A. Foss, *Theories of Human Communication* (United States: Waveland Press, 2011) hlm. 24, diakses 12 November 2024 pada laman [researchgate.net/331627746/](https://www.researchgate.net/331627746/).

¹³ Muslem, ‘Konsep Islamisasi Ilmu Pengetahuan Dan Penerapannya Dalam Pendidikan Islam’, *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam*, 2019, hlm. 51,

Abul A'la Maududi, seorang intelektual dan pemikir Islam terkemuka, menegaskan bahwa Islam merupakan panduan menyeluruh yang meliputi seluruh dimensi kehidupan manusia. Menurut pandangannya, Islam tidak hanya membahas persoalan ibadah seperti salat dan puasa, tetapi juga memberikan kerangka aturan serta pedoman bagi berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan sosial, kegiatan ekonomi, pemerintahan, dan bidang-bidang lainnya. Gagasan Islamisasi yang dikemukakan oleh Maududi bertumpu pada keyakinan bahwa seluruh aspek kehidupan, baik individu maupun masyarakat, harus selaras dengan ajaran dan prinsip-prinsip Islam.¹⁴

Penelitian ini mengkaji bagaimana *Islamic Society of Papua New Guinea* mempromosikan agama mereka melalui dakwah, yaitu penyebaran ajaran Islam. Organisasi tersebut memindahkan praktik ibadah yang biasanya bersifat pribadi ke ruang publik dengan tujuan untuk memperlihatkan eksistensi mereka kepada pemerintah Papua Nugini, memperoleh pengakuan resmi, serta mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh komunitas Muslim di negara tersebut.

2. Teori Kelompok Minoritas

Teori kelompok minoritas menjelaskan bahwa istilah "minoritas" tidak hanya mengacu pada jumlah atau kuantitas,

diakses tanggal 13 November 2024 pada laman jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/571/.

¹⁴ Abdul Rashid Moten, 'Islamization of Knowledge in Theory and Practice: The Contribution of Sayyid Abul A'lā Mawdūdī', *Islamic Research Institute*, 43.2 (2004), hlm. 266, diakses tanggal 24 November 2024 pada laman jstor.org/20837343/.

tetapi juga memiliki konotasi yang lebih luas dalam dimensi sosial. Kelompok minoritas dapat merujuk pada kelompok agama yang jumlahnya lebih sedikit dalam masyarakat. Selain itu, kelompok minoritas sering kali digambarkan dengan perlakuan yang berbeda, baik dalam konteks sosial maupun politik, yang cenderung mengarah pada perlakuan yang negatif.¹⁵

Louis Wirth mendefinisikan kelompok minoritas sebagai kelompok yang diperlakukan secara berbeda dan tidak adil oleh anggota masyarakat lainnya akibat perbedaan karakteristik fisik atau budaya mereka, yang menyebabkan mereka merasakan diskriminasi sebagai suatu kelompok. Dalam kajian sosiologi, istilah "kelompok subordinat" sering digunakan secara bergantian dengan "kelompok minoritas," sementara "kelompok mayoritas" merujuk pada kelompok yang memegang kekuasaan dan dominasi yang lebih besar. Penentuan status sebagai kelompok minoritas tidak bergantung pada jumlah populasi, melainkan pada ketidakseimbangan kekuasaan yang dimiliki oleh kelompok tersebut.¹⁶

Menurut Schermerhorn, teori kelompok minoritas menjelaskan bahwa kelompok-kelompok ini terpisah atau terisolasi dari sisa populasi lainnya, baik dalam tingkat yang besar maupun kecil, oleh

¹⁵ Mathias Blanz, dkk, 'Positive-Negative Asymmetry in Social Discrimination: The Impact of Stimulus Valence and Size and Status Differentials on Intergroup Evaluations', *British Journal of Social Psychology*, 1995, hlm. 410, diakses tanggal 24 November 2024 pada laman psycnet.apa.org/.

¹⁶ Louis Wirth, *The Problem of Minority Groups* (New York: Irvington Publishers, 1993) hlm 347, diakses tanggal 25 November 2024 pada laman scribd.com/429626529/.

faktor-faktor seperti bahasa, agama, gaya hidup, atau asal-usul etnis. Secara garis besar, kelompok minoritas adalah kelompok yang jumlahnya lebih kecil dari setengah populasi dalam suatu masyarakat dan memiliki sejarah hidup serta budaya yang secara signifikan berbeda dari kelompok mayoritas. Status minoritas sering kali diberikan kepada sebuah kelompok berdasarkan faktor-faktor yang tidak dapat dipilih, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, atau status keluarga. Kelompok minoritas juga seringkali harus beradaptasi dengan nilai-nilai yang merendahkan mereka, yang menganggap mereka sebagai kelompok yang "lebih rendah", dan hal ini sering kali dinormalisasi dalam masyarakat. Selain itu, faktor historis juga berperan dalam pembentukan kelompok minoritas, yakni melalui peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh kelompok tersebut sepanjang sejarah mereka, yang membedakan mereka dari kelompok lain dalam masyarakat. Pengalaman historis ini mencakup peristiwa besar seperti penindasan, diskriminasi, perang, kolonisasi, atau migrasi, yang memengaruhi identitas, nilai, dan cara kelompok minoritas berinteraksi dengan kelompok lainnya.¹⁷

Penelitian ini menggunakan teori kelompok minoritas untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan umat Muslim di Papua Nugini menjadi kelompok minoritas. Teori ini juga digunakan untuk mengevaluasi adanya perlakuan yang berbeda dari masyarakat maupun pemerintah Papua Nugini terhadap

¹⁷ R. A. Schermerhorn, 'Toward a General Theory of Minority Groups', *Clark Atlanta University*, 25.3 (1964), hlm. 246, diakses tanggal 24 November 2024 pada laman [jstor.org/273779/](https://www.jstor.org/273779/).

kelompok minoritas, khususnya umat Muslim. Selain itu, teori kelompok minoritas berfungsi untuk mengidentifikasi faktor-faktor historis yang menyebabkan umat Muslim menjadi kelompok minoritas di Papua Nugini.

3. Teori Problematika Sosial

Teori problematika sosial dibangun berdasarkan pemahaman mengenai proses definisi, perkembangan, dan penanganan masalah sosial. Teori ini mengkaji bagaimana suatu kondisi atau perilaku tertentu dianggap sebagai "masalah sosial" oleh masyarakat, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi respons sosial terhadapnya. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Howard Becker, yang menyatakan bahwa masalah sosial muncul sebagai akibat dari cara masyarakat atau kelompok sosial yang memberikan label atau penilaian terhadap tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan norma atau kepentingan kelompok mayoritas.¹⁸

Menurut Blumer, problematika sosial tidak hanya sekadar kondisi yang secara objektif dianggap buruk atau berbahaya. Problematika sosial muncul ketika masyarakat secara kolektif sepakat untuk mendefinisikannya sebagai suatu masalah. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan proses bagaimana masyarakat berdiskusi, mendefinisikan, dan memutuskan suatu isu menjadi problematika sosial, daripada hanya berfokus pada sifat

¹⁸ Howard Becker, *Outsiders: Studies in The Sociology Of Deviance* (New York: The Free Press, 1963) hlm. 9, diakses tanggal 24 November 2024 pada laman monoskop.org/2/2b/Becker_Howard/.

objektif dari kondisi tersebut.¹⁹ Isu-isu yang berpotensi menjadi problematika sosial dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah peran media massa. Media massa memainkan peran yang sangat penting dalam mengonstruksi dan menyampaikan problematika sosial kepada publik. Media massa tidak hanya berfungsi sebagai saluran untuk meneruskan pesan secara objektif, tetapi juga berperan dalam menentukan bagaimana suatu problematika sosial dipersepsikan oleh masyarakat. Proses seleksi dan penyajian informasi oleh media dapat menyebabkan perubahan terhadap pesan asli yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam masalah tersebut. Media seringkali memperbesar masalah untuk memberikan kesan yang lebih dramatis atau, sebaliknya, mengecilkan isu jika dianggap kurang menarik atau relevan bagi audiens.²⁰

Penelitian ini menggunakan teori problematika sosial untuk menganalisis tantangan yang dihadapi oleh minoritas Muslim di Papua Nugini. Lebih lanjut, teori problematika sosial menjelaskan bagaimana sebuah situasi dapat ditafsirkan sebagai masalah bagi umat Islam. Teori ini juga digunakan untuk melihat isu-isu yang tidak hanya berasal dari faktor eksternal, tetapi juga kesulitan internal yang dihadapi oleh Muslim di Papua Nugini dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

4. Teori Gerakan Sosial

¹⁹Joseph W. Schneider, 'Social Problems Theory: The Constructionist View', *Annual Reviews Press*, 1985, hlm. 210, diakses pada 25 November 2024 pada laman [jstor.org/2083292/](https://www.jstor.org/2083292/).

²⁰ *Ibid.*, hlm. 222.

Teori gerakan sosial mencakup berbagai konsep dan kerangka analitis yang dirancang untuk memahami proses pembentukan, perkembangan, dan dampak sosial dari gerakan sosial. Tindakan kolektif ini dikoordinasikan oleh kelompok atau komunitas tertentu dengan tujuan mendorong perubahan di berbagai aspek kehidupan, seperti sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Gerakan sosial bertujuan untuk membawa perubahan besar dengan cara memperjuangkan isu-isu yang dianggap penting. Guna mencapai tujuan ini, gerakan sosial mengumpulkan dukungan, baik dalam bentuk tenaga, dana, maupun ide, dari berbagai sumber (memobilisasi sumber daya). Dengan sumber daya tersebut, mereka berusaha menantang aturan, kebijakan, atau sistem kekuasaan yang dianggap tidak adil atau perlu diubah.²¹

Menurut Charles Tilly, gerakan sosial merupakan upaya kolektif yang dilakukan oleh sekelompok individu untuk mengatasi ketidakadilan atau ketimpangan yang dirasakan dalam masyarakat. Sebagai upaya dalam menyampaikan pesan kepada publik atau otoritas pemerintah, gerakan ini menggunakan tiga jenis klaim utama. Pertama, klaim program yang menjelaskan posisi mereka, baik mendukung maupun menentang kebijakan tertentu. Berikutnya ada klaim identitas, yang menegaskan kesatuan dan kekuatan kelompok mereka, serta menunjukkan komitmen untuk memperjuangkan tujuan. Terakhir, klaim kedudukan yang mengilustrasikan hubungan mereka dengan pihak

²¹ Oman Sukmana, *Konsep Dan Teori Gerakan Sosial* (Malang: Intrans Publishing, 2016) hlm. 11, diakses tanggal 25 November 2024 pada laman scribd.com/493654949/.

lain, misalnya dengan menegaskan hak sebagai warga negara atau menyatakan keberatan terhadap kelompok tertentu. Strategi penyampaian klaim ini disesuaikan dengan konteks budaya dan kondisi politik setempat, agar pesan yang disampaikan lebih relevan dan efektif dalam mencapai tujuan.²²

Penelitian ini menggunakan teori gerakan sosial untuk melihat *Islamic Society of Papua New Guinea* sebagai organisasi sosial yang menangani berbagai isu yang dihadapi oleh umat Islam di Papua Nugini. Teori ini juga membantu menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh *Islamic Society of Papua New Guinea* sebagai bentuk gerakan sosial melalui tiga klaim: program, identitas, dan posisi.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan melalui teknik penelitian pustaka. Metode ini mencakup beberapa tahap yang meliputi

1. Pemilihan Topik

Menurut Kuntowijoyo pemilihan topik penelitian sejarah perlu memperhatikan tiga kedekatan utama, yaitu kedekatan emosional, kedekatan intelektual, dan perencanaan penelitian yang matang. Kedekatan emosional merujuk pada rasa tertarik, semangat, dan keterlibatan batin peneliti terhadap topik yang akan ditulis, yang berperan sebagai motivasi dalam proses penggalan dan penulisan.

²² Charles Tilly, *Social Movements 1768-2004* (London: Paradigm Publisher, 2007) hlm. 12, diakses tanggal 25 November 2024 pada laman voidnetwork.gr/wp-content/.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan kedekatan emosional sebagai sesama Muslim untuk memahami perjuangan Muslim minoritas di Papua Nugini yang menghadapi tantangan dalam menjalankan ajaran agama, termasuk tekanan sosial dan potensi diskriminasi dari kelompok mayoritas. Kondisi ini menumbuhkan empati dan ketertarikan penulis untuk meneliti kehidupan keagamaan mereka serta dinamika praktik Islam di tengah keterbatasan tersebut.

Selanjutnya, kedekatan intelektual mencakup pemahaman dan penguasaan peneliti terhadap topik yang dipilih agar kajian yang dihasilkan memiliki kedalaman serta kredibilitas. Kedekatan intelektual yang dimiliki oleh penulis diperoleh melalui pendalaman mata kuliah *“Sejarah Islam Kawasan Asia dan Oceania”* di mana dalam ujian semester, penulis mengangkat topik mengenai Islam di Papua Nugini. Pendekatan yang digunakan dalam mata kuliah tersebut akan dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian ini.

Pemilihan topik juga harus memiliki perencanaan penelitian, yakni tahapan awal yang mencakup perumusan tujuan, metode yang digunakan, serta sumber yang dijadikan rujukan. Perencanaan penelitian yang dilakukan oleh penulis mencakup pengumpulan data awal mengenai gambaran umum Islam di Papua Nugini, serta pengumpulan data lainnya yang akan dibaca dan dianalisis lebih mendalam pada proses penelitian.

Pemilihan topik yang tepat memengaruhi arah serta sistematika penelitian historis secara menyeluruh, dengan memperhatikan keunikan, relevansi, keterpaduan konsep, orisinalitas, serta

keterjangkauan sumber data. Melalui pemilihan topik yang cermat, peneliti sejarah berperan sebagai penggali makna yang menelusuri jejak masa lalu demi menyajikan pemahaman historis yang mendalam dan kontekstual.²³

2. Tahapan Pengumpulan data (Heuristik)

Heuristik merupakan tahapan awal dalam penelitian sejarah yang merujuk pada kegiatan menghimpun sumber-sumber yang relevan melalui proses penelusuran data, guna memperoleh informasi yang dapat menjelaskan peristiwa masa lampau secara deskriptif. Sumber-sumber yang dimanfaatkan dalam penelitian ini bersifat empiris, yakni diperoleh melalui metode pengumpulan data berupa kajian pustaka terhadap buku-buku dan literatur yang berkaitan langsung dengan fokus penulisan sejarah. Pendekatan ini bertujuan untuk menyusun dasar informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²⁴

Penelitian ini menggunakan metodologi pengumpulan data studi literatur, dengan memanfaatkan sumber-sumber primer seperti artikel berita online, koran, catatan perjalanan dari situs web resmi *Islamic Society of Papua New Guinea*, dan saluran sosial media mereka. Selain itu, penulis juga mengumpulkan sumber-sumber sekunder, termasuk buku, jurnal, artikel, dan literatur lain yang relevan, untuk memperkuat data.

²³ Bobi Hidayat dkk, 'Metode Penelitian Sejarah', *Modul Universitas Muhammadiyah Metro*, 2023, hlm. 5-6 dikutip tanggal 13 Mei 2025 pada laman lmsspada.kemdiktisaintek.go.id/.

²⁴ Dudung Abdurrahman, *Metode Penulisan Sejarah* (Surabaya: Logos Wacana Ilmu, 1996) hlm. 36, diakses tanggal 14 November 2024 pada laman digilib.uin-suka.ac.id/40455/.

3. Tahap Verifikasi

Verifikasi merupakan tahap penting dalam penelitian sejarah yang mencakup pengujian terhadap data yang telah dikumpulkan, baik secara internal (isinya) maupun eksternal (fisiknya). Proses ini bertujuan untuk memperoleh data yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Kritik terhadap sumber sejarah dilakukan guna memastikan validitas dan autentisitas informasi yang terkandung di dalamnya. Seorang sejarawan pada tahap ini mengevaluasi kebenaran sumber yang digunakan, baik berupa dokumen, arsip, maupun bentuk bukti lainnya. Langkah ini merupakan bagian penting dari metodologi penelitian sejarah karena menentukan sejauh mana sumber tersebut dapat dijadikan dasar dalam penulisan narasi historis yang akurat dan dapat dipercaya.²⁵

Pada tahap ini, penulis melakukan kritik internal dengan membandingkan berbagai sumber yang berbeda satu sama lain. Misalnya, membandingkan informasi dari buku dengan informasi dari jurnal akademis, atau sumber dari Indonesia dengan sumber internasional. Untuk kritik eksternal, penulis juga mengaitkan data yang terkumpul dengan kondisi aktual pada saat peristiwa tersebut diteliti. Hal ini termasuk memeriksa konteks sosial, ekonomi, agama, dan politik. Untuk memahami kondisi sebenarnya pada periode topik ini, penulis menggunakan situs web dan media sosial langsung dari *Islamic Society of Papua New Guinea*.

²⁵ Wasino dan Endah Sri Hartatik, *Metode Penelitian Sejarah: Dari Riset Hingga Penulisan* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018) hlm. 12, diunduh tanggal 13 November 2024 pada laman eprints.undip.ac.id/70451/.

4. Tahap Interpretasi

Tahap interpretasi merupakan proses penafsiran terhadap data yang telah disusun secara faktual. Penafsiran ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis, yaitu menguraikan serta memadukan fakta-fakta yang relevan dengan tema penelitian agar menghasilkan pemahaman yang selaras. Setelah melalui tahap kritik sumber, peneliti menganalisis data yang telah diperoleh, menghubungkannya dengan data lain yang mendukung, dan memberikan interpretasi berdasarkan kemampuan analitisnya. Tahapan ini berfokus pada pengukuran objektif terhadap fenomena sosial melalui metode yang sistematis serta didasarkan pada landasan teori.²⁶

Model interpretasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analitis dan sintetis. Pendekatan analitis merujuk pada proses penguraian dan pengamatan mendalam terhadap peristiwa-peristiwa serta perkembangan Islam di Papua Nugini. Selanjutnya, tahap sintesis merupakan proses penggabungan hasil penguraian dari tahap analisis dengan menerapkan landasan teori yang relevan, yang telah ditentukan berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian.²⁷

5. Historiografi

Historiografi merupakan tahap akhir dalam penelitian sejarah yang berfungsi untuk menyusun dan menyajikan hasil penelitian secara sistematis. Pada tahap ini, penulis merumuskan hasil

²⁶ *Op.Cit.*, Dudung Abdurrahman, hlm. 55.

²⁷ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2018) hlm. 78 diunduh tanggal 13 November 2024 pada laman academia.edu/57371911/.

analisis data sejarah ke dalam bentuk karya tulis ilmiah, yaitu skripsi, yang memuat bagian pendahuluan, pembahasan hasil penelitian, serta simpulan. Kegiatan ini mencakup proses penulisan, penyajian, dan pelaporan temuan-temuan historis berdasarkan data yang telah dihimpun, diverifikasi, dan diinterpretasikan sebelumnya. Historiografi tidak hanya menekankan aspek naratif, tetapi juga bertujuan menyampaikan hasil pemikiran mengenai peristiwa-peristiwa masa lampau secara bertanggung jawab.²⁸

Model penulisan yang penulis gunakan ialah model penulisan historiografi modern, yakni cara penulisan ilmiah. Di mana isi yang terkandung di dalam tulisan memuat berbagai sudut pandang dan cara penulisan yang berbentuk naratif. Dalam setiap bagian dijabarkan dalam bentuk bab yang kemudian diperinci menjadi beberapa sub-bab dengan tetap memperhatikan korelasi antar bagiannya.

H. Sistematika Penulisan

Untuk menyajikan tulisan mengenai *Sejarah Perjuangan Organisasi Muslim Di Papua Nugini: Upaya Mendapatkan Pengakuan Resmi Pada Tahun 1983*, maka dalam penyusunan skripsi ini harus disusun secara sistematis dalam lima bab. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I yaitu Pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, tinjauan

²⁸ *Op.Cit.*, Dudung Abdurrahman, hlm. 56.

pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II akan membahas mengenai sejarah berdirinya *Islamic Society of Papua New Guinea* dan masuknya islam ke Papua Nugini.

Bab III akan membahas tentang beberapa problematika umat Muslim minoritas di Papua Nugini baik dalam bentuk internal maupun eksternal.

Bab IV akan membahas tentang upaya *Islamic Society of Papua New Guinea* dalam menyelesaikan problematika umat Muslim minoritas di Papua Nugini.

Bab V merupakan bagian akhir dari laporan penelitian yang berfungsi sebagai penutup. Bagian ini berisi kesimpulan, saran dan kritik yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan. Pada bagian kesimpulan, penulis menyajikan jawaban atas pertanyaan utama yang dirumuskan dalam masalah penelitian, dengan merujuk pada temuan dan analisis yang telah dibahas di bab sebelumnya.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON